

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan sebagai kegiatan pembelajaran telah dilakukan manusia dalam pelaku pendidikan. Pendidikan merupakan suatu sistem yang harus dijalankan secara terpadu dengan sistem yang lain guna mencapai tujuan pendidikan. Di Indonesia masalah pendidikan menjadi hal yang utama bahkan mendapat perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengadakan inovasi-inovasi baru agar pendidikan di Indonesia bias terus berkembang dan mampu menghadapi persaingan global di dunia.

Sarana pendidikan adalah manusia. "Pendidikan bertujuan menumbuh kembangkan potensi manusia agar menjadi manusia dewasa, beradab dan normal" (Jumali dkk., 2004:1). Pendidikan dan politik adalah dua elemen yang sangat penting dalam sistem sosial politik disetiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian yang terpisah dan tidak memiliki hubungan apa-apa, tetapi keduanya saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik politik di suatu negara. Keberhasilan politik di suatu negara bukan hanya diukur dengan adanya pemilu, lembaga-lembaga

pemerintahan seperti Presiden, MPR, DPR, dan lain-lain. Keberhasilan politik suatu negara dapat diukur dengan kedewasaan politik warga negaranya, seperti tidak ada lagi *money* politik, tidak ada orang-orang yang hanya mementingkan partai sendiri sedang partai lain adalah musuh, pawai jalanan yang membuat resah masyarakat dan lain sebagainya. Untuk menuju kedewasaan politik bagi warga negara Indonesia harus diadakan pendidikan politik. Pendidikan politik menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Pendidikan politik harus mendapatkan perhatian yang lebih seperti halnya bidang pendidikan lainnya. Pendidikan politik memegang peranan yang sangat vital untuk mencapai kehidupan bangsa yang lebih demokratis, dengan pendidikan politik dibentuk dan dikembangkan warga negara yang memiliki kesadaran politik dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik ditinjau dari sudut proses merupakan upaya pewarisan nilai-nilai budaya bangsa, proses peningkatan dan pengembangan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, partisipasi politik warga negara memberikan kontribusi bagi pembangunan demokrasi Indonesia serta sesuai dengan cita-cita bangsa yang terkandung dalam UUD 1945.

Sebuah Negara demokrasi, semua rakyatnya harus paham, dan mengerti tentang politik. Di era keterbukaan Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpolitik praktis sebagai subjek politik tanpa ada hambatan psikologis apa pun. Pemerintah harus melakukan pembinaan pendidikan politik kepada masyarakat secara serius. Pendidikan politik diarahkan untuk mengembangkan dan membentuk dimensi

fisik yang meliputi kekuatan jasmani dan dimensi moral. Dimensi moral meliputi kekuatan akal dan kalbu, agar setiap kader memiliki kelayakan sebagai pengemban amanah partai dan amanah bangsa. Pendidikan politik diharapkan agar setiap individu mampu memahami berbagai isu, peristiwa, problematika yang muncul ke permukaan, baik yang berskala lokal, regional, maupun internasional.

Pendidikan politik bertujuan untuk menanamkan pemahaman dan bermacam aspek yang muncul dari setiap permasalahan yang berkaitan dengan dunia politik (Soepiandhy, 2011:96). Pendidikan politik bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik, kesadaran politik, dan membentuk kemampuan individu dalam berpartisipasi politik.

Penanaman pendidikan politik perlu ditanamkan sejak dini, agar masyarakat lebih mengerti keadaan politik di Indonesia. Penanaman pendidikan politik dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal. Dalam pendidikan formal (di sekolah) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran penting untuk pendidikan politik.

Pendidikan politik sangatlah penting hal ini sesuai pernyataan Hatta sebagaimana dikutip oleh Hermawan (2001:4), sebagai berikut:

Pendidikan politik dilakukan supaya keinsyafan rakyat akan hak dan harga dirinya bertambah kuat dan pengetahuannya tentang politik, hukum dan pemerintahan bertambah luas. Dengan ini Indonesia akan menjadi pemerintahan yang berdasar kerakyatan dan kebangsaan berdasar kepada rakyat dan takluk pada keinginan rakyat.

Pendidikan politik dapat dilakukan dalam enam lingkungan yang umum diketahui, yaitu sebagai berikut:

1. *Keluarga*. Keluarga merupakan *primary group* dan agen pendidikan yang utama untuk membentuk karakter politik individu. Hal ini karena

keluarga adalah lembaga sosial yang paling dekat. Peran ayah, ibu, dan saudara terhadap pandangan politik satu individu sangat besar. Tokoh Soekarno misalnya, memperoleh nilai-nilai pertentangan terhadap Belanda melalui ibunya, Ida Ayu Nyoman RAi. Ibunya, yang merupakan keluarga bangsawan Bali menceritakan kepahlawanan raja-raja Bali dalam menentang Belanda. Cerita-cerita tersebut menumbuhkan kesadaran Soekarno untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya yang terjajah oleh Belanda.

2. *Sekolah*. Sekolah merupakan *secondary group*. Kebanyakan dari kita mengetahui lagu kebangsaan, dasar negara, pemerintah yang ada, dari sekolah. Oleh sebab itu, sistem pendidikan nasional selalau tidak terlepas dari pantauan negara oleh sebab peran pentingnya.
3. *Peer Group*. *Peer group* termasuk agen pendidikan politik. *Peer group* adalah teman-teman sebaya yang mengelilingi seorang individu. Apa yang dilakukan teman sebaya tentu sangat mempengaruhi tindakan individu. Moh. Hatta misalnya, banyak memiliki pandangan sosialis saat bergaul dengan teman kuliahnya di negeri Belanda. Melalui kegiatan dengan kawan sebaya, Hatta mampu mengeluarkan konsep koperasi sebagai lembaga ekonomi khas Indonesia pada kemudian hari. Demikian pula, dengan pandangannya atas sistem politik demokrasi yang bersimpangan dengan jalan Soekarno.
4. *Media Massa*. Media massa merupakan agen pendidikan politik *secondary group*. Pengaruh media massa terhadap individu tak perlu disebut lagi. Berita-berita yang dikemas dalam media visual (televisi), surat kabar cetak, internet, ataupun radio, yang berisi perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak mempengaruhi kita. Meskipun tidak memiliki kedalaman, media massa mampu menyita perhatian individu, sebab sifatnya yang terkadang menarik atau cenderung berlebihan.
5. *Pemerintah*. Pemerintah merupakan agen pendidikan politik *secondary group*. Pemerintah merupakan agen yang mempunyai kepentingan langsung atas sosialisasi maupun pendidikan politik. Pemerintah yang menjalankan sistem politik dan stabilitasnya melibatkan diri dalam pendidikan politik, menentukan beberapa mata pelajaran yang ditujukan untuk memperkenalkan siswa pada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah secara tidak langsung melakukan sosialisasi dan pendidikan politik melalui tindakannya. Melalui tindakan pemerintah, orientasi afektif individu bias terpengaruh dan mempengaruhi budaya politiknya.
6. *Partai politik*. Partai politik adalah agen sosialisasi sekaligus pendidikan politik *secondary group*. Partai politik membawakan kepentingan nilai spesifik dari warga negara, seperti agama, kebudayaan, keadilan, nasionalisme, dan sejenisnya. Melalui kegiatan politik dan kegiatannya, individu mengetahui kegiatan politik di negara, pemimpin baru, dan kebijakan yang ada (Mufti, 2013:85-86).

Dilihat dari keterangan di atas pemerintah mempunyai andil yang sangat besar dalam upaya pemberdayaan pendidikan politik di masyarakat. Salah satu lembaga pemerintah yang dekat dengan masyarakat adalah lembaga legislatif khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berkedudukan di masing-masing daerah diseluruh Indonesia. Sebagai badan legislatif, DPRD selain berfungsi sebagai badan pembuat perundangan juga sebagai agen sosialisasi politik (Budiardjo, 1993:120).

Pemberdayaan pendidikan politik seharusnya tidak hanya dapat dilakukan oleh laki-laki namun, pada kenyataannya di Indonesia perempuan berperan sangat buruk bila melihat realitas realitas politik yang ada, perempuan hanya menjadi objek politik, tetapi juga apatis terhadap perkembangan kaumnya. Dalam sistem politik kita yang berlaku selama ini, kebijakan yang berlaku menempatkan perempuan hanya sebagai *second person* (orang kedua) setelah laki-laki. Akibatnya nasib perempuan tidak pernah mengalami perubahan yang signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2005 menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara masih rendah (Utami, 2001:1-2).

Tidak dapat dipungkiri, keberadaan perempuan disegala aspek kehidupan memiliki peranan yang sangat besar. Tidak hanya sebagai pendamping laki-laki, kini perempuan juga mempunyai kedudukan yang dapat dikatakan sejajar dengan kaum laki-laki. Pergerakan perempuan dalam memperjuangkan kesejajarannya dengan kaum laki-laki tentu saja melalui proses yang panjang dan berliku. Contohnya pada era perjuangan Indonesiadahulu yang dipelopori oleh: Cut Nyak

Dien, Cut Meutia, Nyai Ageng Serang, R.A Kartini, dan sederet pejuang perempuan lainnya, berjuang dalam medan perang bersama kaum laki-laki demi menghendaki suatu perubahan dalam kehidupan masyarakatnya.

Nampaknya, perjuangan para tokoh perempuan di masa lalu membawa dampak yang sangat besar bagi perjuangan kaum perempuan di masa kini. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, peranan perempuan di segala segi kehidupan juga mengalami perkembangan yang demikian pesat. Perempuan telah mampu merambah segala bidang kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, sosial budaya, bahkan politik.

Sebagai contoh, pada awal reformasi keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik tercermin dengan terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Hal tersebut membawa pengaruh bagi kelanjutan memperjuangkan hak kaum perempuan untuk ikut berkiprah dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Di dalam Kabinet Indonesia Bersatu II terdapat beberapa jabatan menteri yang dipegang oleh perempuan, dengan masuknya perwakilan perempuan dalam bidang esekutif telah memberi gambaran bahwa peran perempuan juga diperhitungkan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan negara tersebut.

Begitu juga dengan peran perempuan di bidang legislatif, dengan adanya Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengemukakan bahwa setiap daftar bakal calon anggota DPR, DPD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, diharapkan mampu mengakomodasi

partisipasi politik bagi perempuan. Adanya peningkatan jumlah anggota perempuan di lembaga legislatif, khususnya di DPRD Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat pula meningkatkan partisipasi serta pemberdayaan pendidikan politik pada masyarakat Wonogiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis selaku mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap peran anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan pendidikan politik di masyarakat karena hal tersebut erat sekali hubungannya dengan kurikulum program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang terdapat dalam mata kuliah Ilmu Politik dan Pemerintah Daerah (Buku Pedoman FKIP UMS,2010). Alasan lain peneliti menggunakan lembaga legislatif karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana anggota parlemen di lembaga legislatif mampu memberdayakan pendidikan politik pada masyarakat.

B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian

Perumusan masalah digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, serta agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan pendidikan politik ?

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam upaya pemberdayaan pendidikan politik pada masyarakat Wonogiri?
3. Bagaimakah kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan pada masyarakat Wonogiri?
4. Bagaimakah solusi mengatasi kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan pada masyarakat Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan salah satu arah dari kegiatan penelitian, maka tujuan harus ditentukan terkait dengan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pemahaman anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan pendidikan politik.
2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam upaya pemberdayaan pendidikan politik pada masyarakat Wonogiri.
3. Mendeskripsikan kendala dalam upaya pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan pada masyarakat Wonogiri.
4. Mendeskripsikan solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala dalam upaya pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan pada masyarakat Wonogiri.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai karya tulis ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dalam pemberdayaan pendidikan politik.
- b. Dapat memberikan gambaran mengenai peran anggota parlemen perempuan terhadap pemberdayaan pendidikan politik pada masyarakat Wonogiri.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi penunjang untuk melatih kemampuan berfikir dan bersikap ilmiah dalam mencari penjelasan dari fenomena politik baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- b. Bagi universitas dan masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan wacana baru serta memasukkan dalam upaya pemberdayaan politik guna mendukung kehidupan politik yang lebih demokratis, bertanggung jawab, dan bermartabat.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah merupakan “suatu penjelasan istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian” (Maryadi dkk., 2010:11). Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran. Menurut penulis peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan

harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

2. Anggota. Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2005:41), dirumuskan bahwa anggota adalah 1 bagian tubuh (terutama tangan dan kaki)—*badannya lemah*; 2 bagian dari sesuatu yang berangkai *kata majemuk “bumiputra” dua—nya*; 3 orang (badan yang menjadi bagian atau masuk suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dsb): *dia adalah seseorang -- partai terlarang*;
3. Legislatif. Menurut kamus politik (2002:312), legislatif adalah kekuasaan yang membuat atau mengeluarkan undang-undang; termasuk salah satu dari tiga jenis kekuasaan Negara yang klasik. Dalam Negara yang berdasar pada kedaulatan rakyat, maka dewan perwakilan rakyat lah yang mempunyai wewenang itu.
4. Perempuan. Menurut penulis perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim.
5. Pemberdayaan. Menurut penulis pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya
6. Pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara (1977:20) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntutan bagi pertumbuhan anak-anak. Artinya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak,

agar mereka sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

7. Politik. Menurut Budiardjo (2008:15) politik (*politics*) adalah “usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis”.